

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Ketimpangan gender menjadi masalah internasional yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Ketimpangan gender menimbulkan adanya kekerasan berbasis gender yang dapat mengancam keamanan dan hak asasi manusia. Kekerasan berbasis gender juga memiliki berbagai jenis yaitu, kekerasan seksual, kekerasan oleh pasangan, kekerasan verbal, praktik-praktik berbahaya seperti *female genital mutilation, honour killing, dan dowry death*.

India menjadi negara tertinggi di dunia yang memiliki tingkat kasus kekerasan berbasis gender terutama dengan perempuan sebagai korbannya. Adanya nilai-nilai patriarki yang masih sangat kental di masyarakat membuat posisi perempuan menjadi semakin terpinggirkan. Pemerintah India sejatinya telah mengupayakan langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional seperti CEDAW.

Pemerintah India membuat berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk memperbarui tatanan hukum yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan. Namun, upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi kasus kekerasan berbasis gender di India. Oleh karena itu, UN Women hadir untuk membantu pemerintah India mengatasi kekerasan berbasis gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di India.

Kasus kekerasan berbasis gender juga meningkat secara signifikan saat pandemi COVID-19 melanda negara-negara di dunia termasuk India. Hal ini dipicu oleh adanya kebijakan karantina wilayah atau *lockdown*. Mengacu kepada pertanyaan penelitian di bab satu. *UN Women* menerapkan peran sebagai fasilitator, mediator, dan inisiator dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah India dan aktor-aktor lainnya. Sebagai fasilitator, *UN Women* melakukan program-program pemberdayaan ekonomi dan juga bantuan ekonomi bagi perempuan yang terdampak oleh pandemi COVID-19.

Sebagai mediator, *UN Women* berupaya merangkul aktor-aktor lain untuk berpartisipasi dalam mengatasi kekerasan berbasis gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan di India. *UN Women* juga bekerja sama dengan para entitas PBB untuk membantu perempuan yang terdampak COVID-19. Bersama dengan perusahaan lokal, *UN Women* berupaya untuk menjangkau korban kekerasan melalui aplikasi *online*, sekaligus memberikan edukasi perempuan akan jenis-jenis kekerasan dan dampaknya terhadap fisik maupun mental.

UN Women juga mengadakan kampanye sebagai upayanya di India, yakni Kampanye 16 Hari Melawan Kekerasan Berbasis Gender. Kampanye ini sebagai bentuk dari peran *UN Women* sebagai inisiator karena kampanye tersebut diselenggarakan secara independen oleh *UN Women* yang sesuai dengan visi dan misinya. Dari ketiga peran yang dijalankan *UN Women* dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di India, terdapat beberapa kendala yang menghambat implementasi peran tersebut yaitu budaya patriarki yang kuat, kurangnya jumlah

aparatus kepolisian, kurangnya koordinasi kebijakan, tidak efektifnya implementasi CEDAW, dan adanya *cultural silence*.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, menjadi penting bagi pemerintah khususnya di negara-negara berkembang untuk meningkatkan regulasi dan peran pemerintah dalam mendukung dan memprioritaskan hak-hak perempuan. Selain itu pemerintah juga perlu memperluas dan meningkatkan keterlibatan banyak pihak dalam mencegah dan mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Apa yang terjadi di India menjadi pembelajaran penting bagi negara lain khususnya negara-negara berkembang yang cenderung memiliki tingkat kekerasan berbasis gender yang tinggi.

Selain itu secara akademis, penulis berharap dan menyarankan bagi para akademisi lainnya yang tertarik dengan pembahasan kekerasan berbasis gender dan *UN Women* untuk dapat melanjutkan penelitian ini. Diharapkan juga agar penelitian selanjutnya dapat menyoroti kekerasan berbasis gender yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya di benua Afrika dan Asia.